KLIPPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 16 Oktober 2018

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo (Halaman, 9)	Selasa, 16 Oktober 2018	Rekonstruksi Kota Palu Pascagempa Hindari Sesar	Pembangunan ulang Kota Palu suisai bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi Sulawesi Tengah akan mempertimbangkan lokasi patahan dan sesar Palu-Koro yang menjadi penyebab bencana berulang-ulang di sana.
2	Koran Tempo (Halaman, 11)	Selasa, 16 Oktober 2018	Rekonstruksi Palu Berbasis Alam	Merujuk dari dampak gempa dan tsunami , Palu harus menjadi kota tangguh bencana berbasis alam.
3	Media Indonesia (Halaman, 2)	Selasa, 16 Oktober 2018	Rp 6 Triliun untuk bangun Kota Palu Baru	Pemerintah merencanakan mendirikan Kota Palu baru karena kerusakan akibat gempa dan tsunami yang terjadi sulit untuk mengembalikan ibu kota Sulawesi Tengah itu dalam kondisi seperti semula.
4	Media Indonesia (Halaman, 15)	Selasa, 16 Oktober 2018	Pemerintah Bangun Rumah Korban Gempa	Kementerian PUPR mempersiapkan pembangunan 1.200 unit hunian sementara (huntara) untuk para korban gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu.
5	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)	Selasa, 16 Oktober 2018	Permintaan Baja Diproyeksi Naik 3%	Kementerian PUPR memproyeksikan kebutuhan besi dan baja untuk proyek pada 2019 akan tumbuh 2%-3% seiring dengan gencarnya pembangunan infrastruktur erutama di kawasan timur.
6	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)	Selasa, 16 Oktober 2018	DPRD Jateng Tolak Ruas Bawen-Yogyakarta	Panitia khusus pembahasan Rancangan Tata Ruang Wilayah atau (RTRW) DPRD Provinis Jateng menghapus proyek Jalan tol Bawen – Yogyakarta.
7	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)	Selasa, 16 Oktober 2018	Opersional KEK TAA Terancam Molor	Rencana operasional Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api atau KEK TAA pada ahir bulan ini akan mengalami kemunduran seiring dengan minimnya relisasi pembangunan di kawasan tersebut.
8	Bisnis Indonesia (Halaman, 10)	Selasa, 16 Oktober 2018	Menggali Paradigma Baru Pendanaan	Pembangunan infrastruktur masih menjadi sorotan utama dan target yang dikejar Indonesia sebagai negara berkembang.
9	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Selasa, 16 Oktober 2018	Menanti Terbentuknya Badan Pengelola Tapera	Realisasi program pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera oleh Kementerian PUPR masih menunggu diresmikanya Badan Pengelola Tapera yang hingga kini belum juga menemukan keputusan final.
10	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Selasa, 16 Oktober 2018	Berita Foto	Pengendara melintas di Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi seksi I yang belum beroperasi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat.
11	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Selasa, 16 Oktober 2018	REI DKI Tunggu Lokasi Lahan dari Pemprov	REI DKI menyatakan siap mendukung program DP 0 tetapi masih menunggu kepastian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk penentuan lahan.
12	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Selasa, 16 Oktober 2018	Waskita Targetkan Kontrak Diteken Januari 2019	PT Waskita Toll Road menargetkan bisa menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol atau kontrak jembatan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara pada Januari 2019.

Judul	**Rekonstruksi Kota Palu Pascagempa Hindari Sesar**	Tanggal	Selasa, 16 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 9)		
Resume	Pembangunan ulang Kota Palu suisai bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi Sulawesi Tengah akan mempertimbangkan lokasi patahan dan sesar Palu-Koro yang menjadi penyebab bencana berulang-ulang di sana.		

Rekonstruksi Kota Palu Pascagempa Hindari Sesar

Tiga kelurahan menjadi lokasi perumahan baru.

Indri Maulidar
indri.maulidar@tempo.co.id

JAKARTA – Pembangunan ulang Kota Palu seusai bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi Sulawesi Tengah akan mempertimbangkan lokasi patahan dan sesar Palu-Koro yang menjadi penyebab bencana berulang-ulang di sana. Apalagi aturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu sebelumnya juga tidak mempertimbangkan mitigasi bencana.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan pemerintah sedang menyiapkan *master plan* baru pembangunan Kota Palu. Rancangan tersebut, yang ditargetkan selesai pada awal 2019, mengatur detail letak permukiman, pusat bisnis, dan mitigasi untuk menghindari efek besar jika terjadi bencana. "Awal tahun depan, Palu baru mulai dibangun," kata Basoeki seusai rapat koordinasi terbatas di Istana Merdeka bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Presiden Joko Widodo, kemarin.

Untuk permukiman, misalnya, akan berpindah ke lokasi yang dinilai aman dan minim risiko likuefaksi. Saat ini Kementerian telah menetapkan tiga kelurahan sebagai lokasi relokasi warga, yakni 78 hektare tanah di Kelurahan Duyu dan 88 hektare lahan di Kelurahan Tondo. Kedua lahan ini terletak di pinggir Kota Palu—tak jauh dari lokasi rumah warga yang terkena tsunami dan likuefaksi. Adapun di Kabupaten Sigi, 210 hektare lahan disiapkan untuk relokasi.

Menurut Basoeki, tantangan utama relokasi dan rekonstruksi Kota Palu adalah sosialisasi. Bukan hanya warga, pemilik gedung kantor dan pertokoan juga harus diberi pemahaman jika harus dipindahkan dari tempat semula. Rekonstruksi diselesaikan dalam dua tahun—dibandingkan dengan rekonstruksi Aceh, yang selama empat tahun.

Sesar Palu Koro terbentang dari Kutai dan Tarakan, Kalimantan Timur, melintasi Selat Makassar, melintasi Kota Palu, lalu berakhir di bagian utara Laut Flores. Gempa di sesar ini berkekuatan dangkal sehingga berpotensi tsunami. Sejak 1927, tercatat ada dua kali likuefaksi di Palu dan sekitarnya akibat gempa. Akhir September lalu, tiga bencana sekaligus menimpa Palu, yang menyebabkan sekitar 2.073 orang meninggal dan 80 ribu lainnya mengungsi. Korban meninggal diperkirakan bertambah karena jenazah di tiga wilayah likuefaksi belum terdata dan terangkat. Adapun evakuasi korban meninggal resmi dihentikan pekan lalu.

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan RTRW Palu dan kabupaten lain selama ini tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Bencana yang lalu menjadi peringatan. "Kami akan mempercepat revisi RTRW," kata Kepala Dinas, Syaiful Djafar.

Beberapa perubahan tersebut, menurut Syaiful, selain relokasi permukiman, menyasar wilayah ekonomi. Pantai Talise dan Pesisir Barat, misalnya, tidak layak lagi digunakan untuk kawasan komersial seperti dalam desain tata ruang sebelumnya. Hotel, mal, dan pertokoan akan dipindah ke selatan kota.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras mengatakan lembaganya bertanggung jawab dalam hal sosialisasi untuk relokasi kepada korban. Pembangunan wilayah permukiman baru, menurut Hartono, tidak hanya mengutamakan rumah, tapi juga kedekatannya dengan fasilitas publik, seperti sekolah dan rumah sakit.

● FRISKI RIANA | FRANCISCA CHRISTY | INDRI MAULIDAR

Judul	**Rekonstruksi Palu Berbasis Alam**	Tanggal	Selasa, 16 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 11)		
Resume	Merujuk dari dampak gempa dan tsunami , Palu harus menjadi kota tangguh bencana berbasis alam.		

Rekonstruksi Palu Berbasis Alam

NIRWONO JOGA
KEMITRAAN KOTA HIJAU

Getaran gempa bumi bermagnitudo 7,4 telah membangkitkan bencana susulan tsunami, tanah longsor, dan likuefaksi yang melanda Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Patut dicatat bahwa banyaknya korban tewas lebih diakibatkan tertimpa reruntuhan bangunan atau terjebak dalam bangunan roboh karena tidak tahan gempa dan terjangan tsunami.

Merujuk dari dampak gempa dan tsunami, Palu harus menjadi kota tangguh bencana berbasis alam. Kota tangguh bencana dirancang dapat bertahan terhadap guncangan tanpa gangguan permanen atau gagal fungsi. Kota itu memiliki kecenderungan untuk memulihkan diri atau menyesuaikan secara mudah terhadap perubahan mendadak atau kenahasan.

Kota dirancang dengan skenario jika dalam kondisi terburuk. Bayangkan bila jaringan listrik padam, jalur telekomunikasi lumpuh, infrastruktur jalan terputus, ketiadaan air bersih, dan bangunan hancur. Pendek kata, kota dalam keadaan lumpuh dan terisolasi.

Rekonstruksi dan rehabilitasi kota perlu diselaraskan dengan kondisi alam lokal. Jejak jalur gempa pada lokasi reruntuhan terparah menandakan kawasan masuk zona berbahaya untuk hunian dan permukiman. Tsunami yang menyapu kawasan tepi pantai dan teluk mempertegas batas wilayah aman dari terjangan tsunami.

Rencana tata ruang dan wilayah Kota Palu

TEMPO/INDRA FAUZI

dievaluasi, direvisi, dan dibandingkan dengan data kerusakan di lapangan dan kajian geologis peta rawan bencana kota terbaru pascagempa. Rencana tata kota baru harus menggambarkan upaya antisipasi (pencegahan terjadinya bencana), mitigasi (pengurangan risiko bencana), dan adaptasi (penyesuaian terhadap perubahan bencana).

Kawasan Teluk Palu dan pantai yang terkena dampak tsunami harus bebas bangunan dengan jarak aman dari bibir pantai minimal 200-500 meter berupa ruang terbuka hijau (RTH) hutan *mangrove*, hutan pantai, dan taman. RTH berfungsi meredam tsunami, menahan abrasi, memperbaiki kualitas lingkungan, seperti ketersediaan air bersih, udara segar, dan habitat satwa liar.

Kawasan pantai dibatasi jalan raya lebar yang berfungsi sebagai jalur evakuasi bencana, lalu lintas kendaraan berat, dan landasan pacu darurat. Jalur evakuasi dilengkapi rambu, marka, papan petunjuk, sirene maupun tanda peringatan tradisional (misalnya kentongan), dan lampu penerang jalan bertenaga surya.

Pada sisi jalan yang menghadap pantai dalam jarak aman, kawasan dataran rendah yang terkena dampak ringan-sedang ditata ulang. Tim audit cepat bangunan dilakukan untuk memastikan prioritas penanganan bangunan rusak ringan/sedang/berat. Bangunan yang sudah runtuh segera dibersihkan. Bangunan dalam kondisi baik, aman, dan layak pakai dipugar agar dapat ditempati kembali warga (dari pengungsian dan pemulihan trauma).

Reruntuhan bangunan yang masih layak pakai didaur ulang dan digunakan kembali untuk membangun rumah dengan cepat. Teknik ini pernah diterapkan saat rekonstruksi dan rehabilitasi perumahan pascagempa di Yogyakarta.

Pembangunan kembali perumahan menerapkan standar bangunan tahan gempa yang dikembangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seperti rumah instan sehat sederhana (Risha), dan perguruan tinggi (lokal) serta mempertimbangkan kearifan lokal dan arsitektur tradisional yang terbukti tahan gempa dan ramah lingkungan.

Pengerahan tenaga konstruksi dan komunitas, didampingi akademikus dan asosiasi profesi terkait, yang semuanya berasal dari daerah itu dan sekitarnya, mendampingi pembangunan rumah warga. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan program rekonstruksi dan rehabilitasi.

Kawasan dikembangkan untuk peruntukan komersial dan perkantoran dengan gedung-gedung bertingkat yang wajib memenuhi standar tahan gempa yang ketat dan menyediakan tempat evakuasi bencana (jika terjadi tsunami).

Permukiman dan kantor pemerintahan dikembangkan ke dataran tinggi atau kawasan perbukitan yang dinilai lebih aman, yang mensyaratkan bangunan standar tahan gempa dan RTH minimal 30 persen setiap kaveling bangunan. Kawasan dilengkapi jalan sebagai jalur evakuasi, lapangan olahraga (posko pengungsian), dan taman-taman (tempat evakuasi).

Masyarakat dibangun budaya sadar bencana, paham jenis kebencanaan, dan siap hidup di lokasi rentan bencana. Mereka harus tahu bagaimana menyelamatkan diri dan bertahan pascabencana melalui latihan simulasi rutin serta tangguh untuk segera bangkit memulihkan diri. ●

SURAT DAN PENDAPAT

(021) 70292900
(021) 725 5645/50
pendapat@tempo.co.id

UNTUK ARTIKEL PENDAPAT, PANJANG TULISAN MAKSIMUM 4000 KARAKTER, DISERTAI FOTO DAN NOMOR TELEPON YANG DAPAT DIHUBUNGI.

Judul	**Rp 6 Triliun untuk bangun Kota Palu Baru**	Tanggal	Selasa, 16 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 2)		
Resume	Pemerintah merencanakan mendirikan Kota Palu baru karena kerusakan akibat gempa dan tsunami yang terjadi sulit untuk mengembalikan ibu kota Sulawesi Tengah itu dalam kondisi seperti semula.		

Rp6 Triliun untuk Bangun Kota Palu Baru

PEMERINTAH merencanakan mendirikan Kota Palu baru karena kerusakan akibat gempa dan tsunami yang terjadi sulit untuk mengembalikan ibu kota Sulawesi Tengah itu dalam kondisi seperti semula.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan masterplan Kota Palu baru akan selesai disusun paling lambat akhir tahun ini. Dengan begitu, permukiman baru penduduk bisa mulai dibangun pada 2019 dan ditempati pada 2020.

"Kita mau bangun Palu baru, jadi kita harus bangun masterplan baru, yang mengadopsi patahan-patahan yang ada dan *historical* gempa yang pernah terjadi di Palu. Dananya diperkirakan Rp5 triliun-Rp6 triliun," ujar Basuki seusai menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, kemarin.

Selama permukiman baru belum dibangun, sambung Basuki, masyarakat akan ditampung di hunian sementara. Pemerintah telah memutuskan untuk membangun 1.200 hunian sementara di Palu, Donggala, dan Sigi.

Menurut Basuki, ada tiga lokasi yang dinilai cocok sebagai tujuan renovasi, yaitu Kelurahan Duyu, Kelurahan Tondo, dan Kelurahan Pombewe. Lokasi-lokasi tersebut dinilai cocok sebagai tempat pembangunan Kota Palu yang baru karena letaknya jauh dari pantai. Kondisi geologi ketiga lokasi itu tengah dipelajari.

Rapat sekitar 2 jam yang membahas penanganan bencana di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah itu juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo. Hadir pula Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Khusus untuk rekonstruksi di Lombok, Kepala Negara menginstruksikan penanganan bencana dilakukan secara cepat sehingga prosedur penerimaan bantuan juga diputuskan untuk dipermudah.

Presiden Jokowi meminta jajarannya mempercepat pencairan dana stimulan untuk korban gempa di NTB.

"Saya laporkan hasil rapat tadi, pertama ialah percepatan pencairan. Jadi, pemerintah sudah menyalurkan dana stimulan, total sekitar Rp1,1 triliun," ujar Willem.

Hal yang menjadi persoalan saat ini ialah mekanisme pencairan agar masyarakat bisa secepatnya menerima dana, tetapi tetap bisa dipertanggungjawabkan. Presiden Jokowi menginstruksikan agar prosedur pencairan disederhanakan.

"Sebelumnya, masyarakat harus mengisi 17 lembar formulir. Bapak Presiden memerintahkan cukup mengisi satu lembar saja. Tetapi satu yang penting, akuntabilitas tetap tidak boleh diabaikan," jelasnya. (Pol/X-10)

Judul	**Pemerintah Bangun Rumah Korban Gempa**	Tanggal	Selasa, 16 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 15)		
Resume	Kementerian PUPR mempersiapkan pembangunan 1.200 unit hunian sementara (huntara) untuk para korban gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu.		

Pemerintah Bangun Rumah Korban Gempa

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempersiapkan pembangunan 1.200 unit hunian sementara (huntara) untuk para korban gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

"Pembangunannya dimulai pekan ini oleh penyedia jasa yang sudah disiapkan dan insya Allah mulai dihuni secara bertahap pada pekan berikutnya dengan target selesai seluruhnya dalam dua bulan ke depan," kata Kepala Satgas Kementerian PU-Pera untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa Palu-Sigi-Donggala, Arie Setiadi Murwanto di Palu, kemarin.

Ia menjelaskan, huntara-huntara tersebut akan dibangun dengan sistem klaster pada lima zona, dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan lahan dan keamanan dari dampak gempa.

Hunian itu berkonstruksi baja ringan dengan dinding berbahan *glassfiber reinforced cement* (GRC) sehingga antisipatif terhadap kondisi Kota Palu yang terkenal sebagai daerah panas karena berada di garis khatulistiwa.

Setiap unit terdiri atas 12 bilik berukuran 17,2 meter persegi dan setiap bilik dihuni satu keluarga. Berarti, ke-1.200 unit itu bisa menampung 14.400 keluarga.

Mantan Dirjen Bina Marga Kementerian PU-Pera itu menjelaskan, setiap unit akan dilengkapi toilet, kamar mandi, tempat mencuci, dapur, serta listrik dengan daya 450 *watt*.

Pada setiap klaster yang terdiri atas 10 unit (120 bilik), akan dibangun satu sekolah PAUD dan sebuah SD, tempat sampah, ruang terbuka untuk kegiatan warga serta tempat parkir sepeda motor. "Hunian-hunian ini bisa dimanfaatkan dalam dua tahun sampai para korban tersebut memiliki hunian tetap," ujar Arie yang didampingi Staf Ahli Menteri PU-Pera Bidang Komunikasi Rudy Novrianto.

Menurut dia, di atas lahan-lahan yang disiapkan untuk pembangunan huntara tersebut, Kementerian PU juga siap menampung huntara-huntara yang dibangun berbagai pihak, tapi dengan desain yang sama dengan yang dibangun Kementerian PU-Pera.

Arie belum menyebutkan lokasi-lokasi pembangunan huntara, namun dalam dua hari ini, Wali Kota Palu, Bupati Sigi, dan Bupati Donggala akan menetapkan lokasi-lokasi pilihan untuk pembangunan huntara. (Ant/S-1)

Judul	**Permintaan Baja Diproyeksi Naik 3%**	Tanggal	Selasa, 16 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Kementerian PUPR memproyeksikan kebutuhan besi dan baja untuk proyek pada 2019 akan tumbuh 2%-3% seiring dengan gencarnya pembangunan infrastruktur erutama di kawasan timur.		

Permintaan Baja Diproyeksi Naik 3%

SIDOARJO — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memproyeksikan kebutuhan besi dan baja untuk proyek pada 2019 akan tumbuh 2%—3% seiring dengan gencarnya pembangunan infrastruktur terutama di kawasan timur.

Peni Widarti
peniwidarti@bisnis.com

Kepala Sub Direaktorat Produktivitas Kementerian PU dan PR, Ellis Sumarna, mengatakan pada tahun ini anggaran pemerintah untuk membangun perumahan, infrastruktur jalan, jembatan, kawasan industri dan fasilitas transportasi mencapai Rp107 triliun.

"Tahun depan anggaran PUPR ditingkatkan menjadi Rp110 triliun. Peningkatan ini tentu juga menjadi potensi bagi industri pemasok material pembangunan seperti baja," katanya di sela-sela peresmian PT Krakatau Megatama Indonesia (KMI) atau Mega Baja Super Store selaku distributor produk baja tulangan beton Krakatau Wajatama, Senin (15/10).

Dia mengatakan, setelah pihaknya melakukan evaluasi, ternyata tahun ini PUPR membutuhkan suplai 1 juta ton baja dan tahun depan diperkirakan meningkat sampai 3%-nya. Sebanyak 40% suplai baja dibutuhkan untuk pembangunan di wilayah Papua, di mana 77%-nya merupakan produk baja tulangan beton.

Kesenjangan yang lebar dalam suplai baja di timur ini menjadi tantangan Kementerian PUPR dalam merealisasikan anggaran pembangunan sesuai dengan target.

Namun begitu, lanjutnya, kebutuhan baja di wilayah timur belum diimbangi oleh suplai dan distribusi sehingga di wilayah ini mengalami defisit baja sampai 400.000 ton, terutama baja tulangan.

"*Gap* yang besar dalam suplai baja di timur ini menjadi tantangan PUPR dalam merealisasikan anggaran pembangunan sesuai dengan target," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan, Ojak Simon Manurung menambahkan pihaknya meminta agar Kementerian PUPR membuat persyaratan pengadaan baja harus memiliki SNI guna memberantas peredaran produk yang tidak sesuai SNI.

"Kami minta PUPR mensyaratkan para pelaku tender proyek harus menggunakan produk baja yang ber-SNI. Karena dari pengawasan kami, ternyata sampai sekarang masih banyak produsen baja yang tidak sesuai SNI," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan komitmen dari para distributor baja dalam menjual produk yang berkualitas dan aman. Selama ini, diduga banyak distributor yang menjual barang tidak ber-SNI dan pabrikan pun ikut memproduksi barang yang tidak sesuai standarnya.

"Saya yakin kalau dengan persyaratan SNI di setiap tender proyek, toko-toko pengecer yang tidak menjual barang berstandar nasional dengan sendirinya akan hilang," ujarnya.

Sementara itu, Kasubdit Program dan Evaluasi Kementerian Perindustrian, Immanuel T.H. Silitonga menambahkan saat ini di Indonesia terdapat sekitar 50 perusahaan baja tulangan atau baja beton yang akan terus didorong untuk menerapkan sertifikasi SNI.

"Kami terus mendorong agar produsen dalam negeri dapat memproduksi baja tulangan beton sesuai SNI yang telah ditetapkan secara wajib agar bisa memenuhi kualitas yang dibutuhkan konsumen khususnya proyek pemerintah," ujarnya.

Berdasarkan catatan Kementerian PUPR, tercatat sudah ada 30 perusahaan baja yang terdaftar di katalog pengadaan material infrastruktur PUPR dan telah memenuhi SNI. Sedangkan yang tidak memiliki SNI tidak bisa masuk dalam daftar katalog tersebut.

KAWASAN TIMUR

Produsen baja tulangan PT Krakatau Wajatama, anak usaha Krakatau Steel (KS) menggandeng distributor PT Mega Group Indonesia mengembangkan pasar di Jawa Timur guna mengejar potensi kebutuhan baja tulangan di wilayah Indonesia Timur.

Direktur Komersial Krakatau Wajatama, Teguh Sarwono mengatakan KS sengaja memilih Mega Group karena dinilai mampu memasarkan produk ke pasar ritel terutama karena memiliki fokus penjualan dan pendampingan edukasi produk ber-SNI.

"Pembukaan cabang Mega Baja di Taman, Sidoarjo ini merupakan yang pertama kalinya di Jatim sebagai upaya perluasan pasar sampai ke Indonesia timur," katanya di sela-sela acara yang sama.

Teguh mengatakan saat ini kapasitas produksi baja tulangan di Krakatau Wajatama mencapai 600.000 ton per tahun. Namun tingkat utilisasinya hanya sekitar 50%-an.

Kondisi tersebut terjadi lantaran adanya persaingan pasar yang ketat terutama oleh serbuan produk impor, apalagi masih banyak produsen yang tidak menerapkan SNI.

Hingga saat ini penjualan Krakatau Wajatama kebanyakan menyasar segmen infrastruktur dengan kontribusi 60%, sebanyak 25% ke pasar ritel dan sisanya masuk ke segmen manufaktur seperti untuk kebutuhan bahan industri otomotif.

"Kontribusi pasar jelas paling banyak di Jawa, lalu disusul Sumatra. Khusus di wilayah timur justru demandnya tinggi, tapi suplainya masih sangat kurang. Untuk itu kita mulai masuk ke wilayah timur melalui distributor Mega Baja Super Store," jelasnya.

Direktur Utama PT Mega Group Indonesia Crop, Deni Djuanda mengatakan saat ini Mega Group sendiri sudah memiliki 58 outlet distribusi yang tersebar di Jawa dan Lampung.

"Rencananya tahun depan kami akan tambah outlet atau pusat distribusi di Palembang dan Kalimantan," katanya.

Khusus di wilayah timur, lanjutnya, pihaknya akan mengembangkan cabang-cabang kecil sebanyak 12 toko—15 toko agar dapat menjangkau masyarakat, bahkan dapat langsung mengedukasi mengenai produk baja SNI agar masyarakat tidak tertipu dengan banyaknya produk baja murah, palsu dan tidak memiliki SNI.

Dalam kesempatan yang sama, Jafung Pembina Jasa Konstruksi Madya Kementerian PUPR, Rusli mengatakan saat ini di wilayah timur sendiri masih defisit produk baja hingga 400.000 ton yang didominasi oleh produk baja tulangan.

"Pemerintah saat ini memang sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur. Hal inilah yang membuat produk baja semakin dibutuhkan khususnya di wilayah timur," imbuhnya.

Judul	**DPRD Jateng Tolak Ruas Bawen-Yogyakarta**	Tanggal	Selasa, 16 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Panitia khusus pembahasan Rancangan Tata Ruang Wilayah atau (RTRW) DPRD Provinis Jateng menghapus proyek Jalan tol Bawen – Yogyakarta.		

DPRD Jateng Tolak Ruas Bawen—Yogyakarta

SEMARANG — Panitia khusus pembahasan Rancangan Tata Ruang Wilayah atau RTRW Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jateng menghapus proyek jalan tol Bawen—Yogyakarta.

Pasalnya, pemerintah saat ini dinilai belum serius dalam mengoptimalkan transportasi massal seperti kereta api, dibandingkan dengan membangun jalan tol.

Ketua Pansus Raperda Revisi RTRW DPRD Jateng, Abdul Azis menuturkan, dengan menghapus proyek jalan tol Bawen—Yogyakarta sepanjang 70 kilometer itu maka keputusan itu akan menyelamatkan lahan pertanian seluas 350 hektare.

"Keuntungannya efisiensi anggaran, dapat menghindari pembangunan di tanah rawan gempa, menyelamatkan 350 hektare lahan basah atau lahan produktif, dan pencegahan eksploitasi material jutaan kubik, jika yang dibangun jalan tol," katanya Senin (15/10).

Menurut Aziz, adanya revisi RTRW bertujuan mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan reaktivasi rel kereta api Semarang—Yogyakarta. Pasalnya, dengan reaktivasi jarak antara Semarang—Yogyakarta akan semakin dekat dengan menggunakan moda transportasi kereta api.

"Komitmen pemerintah harus lebih serius membangun sistem transportasi berbasis masal. Kita hanya memberi satu-satunya opsi, selain pengembangan jalan nasional, ya reaktivasi rel kereta api," ujarnya.

Aziz menegaskan, investasi kereta api lebih murah dibandingkan dengan pembangunan jalan tol, dan infrastruktur itu dinilai hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja.

"Nilai investasinya lebih murah, kalau kereta api itu Rp25 miliar—Rp30 miliar per kilometer dan secara keseluruhan hanya Rp2 triliun.

Sementara itu, pembangunan jalan tol mencapai Rp150 miliar per kilometer dan keseluruhan anggaran mencapai Rp10 triliun. Kita bisa menyimpan Rp8 triliun, digunakan membangun rel kereta api dari Semarang, ke arah Kudus dan Rembang," terangnya.

Kendati demikian, proyek tol Bawen—Yogyakarta sudah ke tahap penetapan lokasi (penlok). Dia menyatakan, akan menunggu evaluasi dari pemerintah pusat, dan jika proyek itu tetap dilaksanakan maka menurutnya akan terjadi pelanggaran peraturan daerah RTRW yang ada.

"Ada beberapa pertimbangan yang objektif yang kami pertimbangkan. Jalan tol ini posisinya equivalent dengan jalan tol Semarang—Solo dan sedang go in project Solo—Yogyakarta tidak jauh-jauh amat jaraknya, kalau malam hari bisa lewat Solo," katanya. *(k28)*

Judul	**Opersional KEK TAA Terancam Molor**	Tanggal	Selasa, 16 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Rencana operasional Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api atau KEK TAA pada ahir bulan ini akan mengalami kemunduran seiring dengan minimnya relisasi pembangunan di kawasan tersebut.		

Operasional KEK TAA Terancam Molor

PALEMBANG — Rencana operasional Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api atau KEK TAA pada akhir bulan ini akan mengalami kemunduran seiring dengan minimnya realisasi pembangunan di kawasan tersebut.

Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS), BUMD pengelola KEK TAA, IGB Surya Negara, mengatakan sejumlah pembangunan sarana dan fasilitas di kawasan itu belum sepenuhnya terealisasi.

"Dengan sisa waktu yang tinggal sedikit, saya rasa sulit untuk bisa beroperasional sesuai dengan jadwal sebelumnya [akhir Oktober]," katanya, Senin (15/10).

Adapun pembangunan yang belum terealisasi, meliputi jalan akses di lokasi, sertifikasi dan pematangan lahan, dan fasilitas pendukung di dalam kawasan.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan akan melanjutkan pembangunan KEK TAA dan Pelabuhan Laut Dalam Tanjung Carat.

Pembangunan kawasan industri tersebut saat ini sangat dibutuhkan mengingat sudah banyak industri yang bermukim di tengah kota.

Dengan demikian, jika nantinya pembangunan KEK TAA dan Pelabuhan Laut Dalam Tanjung Carat terealisasi, maka kawasan industri bakal dipindahkan.

"Pembangunan KEK TAA harus berlanjut. Apalagi ini sudah jadi program nasional yang ditandatangani langsung oleh Presiden," katanya.

Apalagi, Herman menambahkan, proyek KEK TAA sudah dirancang oleh beberapa gubernur sebelumnya. Dia memastikan KEK TAA tetap menjadi prioritas.

Sebagai bentuk komitmen, Herman menegaskan siap memperlunak aturan perizinan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah. "Sehingga, investor yang berminat menanamkan investasi bisa masuk. Kami siap melaksanakan diskresi aturan jika kewenangannya ada di Pemda. Hanya saja, jika berbenturan dengan pemerintah pusat, tentu harus ada pembahasan lebih lanjut," katanya.

TUNDA INVESTASI

Dalam perkembangannya, manajemen PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS), BUMD pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) TAA dan Tanjung Carat, menyatakan banyak calon investor yang menunda kegiatan investasinya di kawasan tersebut karena terhambat jaminan kepemilikan hak atas tanah.

Direktur Utama PT SMS, IGB Surya Negara mengatakan, hambatan tersebut lebih banyak muncul dari investor yang menunda untuk menandatangani kontrak kerja samanya untuk berinvestasi di KEK TAA dan Tanjung Carat.

"Ada beberapa rencana jaminan kemudahan investasi yang belum dapat dipastikan akan terpenuhi. Sehingga investor kini cenderung masih *wait and see*," katanya, Senin (15/10).

Dia mengatakan jaminan tersebut yakni kepastian kepemilikan hak atas tanah, Tanjung Carat sebagai bagian dari KEK TAA terkait dengan rencana pengerukan KEK TAA dengan pasor laut bersamaan dengan reklamasi Tanjung Carat. Kemudian, jaminan bebas PPN penyerahan barang dan jasa pada saat pembangunan di Kawasan KEK, serta kebebasan penggunaan atau transaksi dengan mata uang asing saat pembangunan di kawasan KEK. **(Dinda Wulandari)**

Judul	**Menggali Paradigma Baru Pendanaan**	Tanggal	Selasa, 16 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 10)		
Resume	Pembangunan infrastruktur masih menjadi sorotan utama dan target yang dikejar Indonesia sebagai negara berkembang.		

Menggali Paradigma Baru Pendanaan

Pembangunan infrastruktur masih menjadi sorotan utama dan target yang dikejar Indonesia sebagai negara berkembang. Pembiayaan yang tidak hanya bergantung kepada pemerintah serta inovasi alternatif pendanaan dinilai menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Menko Perekonomian Darmin Nasution (baris pertama ketiga kiri) bersama para menteri dan pejabat perusahaan BUMN dalam acara Indonesia Investment Forum 2018 di Nusa Dua, Bali.

M. Nurhadi Pratomo
nurhadipratomo@bisnis.com

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pada rentang 2015—2019, pemerintah mengerahkan untuk membangun berbagai macam infrastruktur.

Beberapa infrastruktur itu di antaranya 1.800 kilometer (km) jalan tol, 2.159 km jalur kereta api antarkota, 24 pelabuhan baru, 15 bandara baru, serta 35.000 megawatt (MW) pembangkit listrik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019 yang telah disusun difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.

Secara lebih rinci, pemerintah telah menetapkan 233 proyek dan 3 program ke dalam proyek strategis nasional (PSN). Adapun, total nilai investasi yang dibutuhkan mencapai US$307,6 miliar.

Dari total kebutuhan investasi itu, Darmin memebut lebih dari 50% pendanaan diharapkan berasal dari sektor swasta. Cara yang digunakan untuk menarik mereka yakni melalui skema public private partnership (PPP) yang didukung pemerintah melalui aspek fiskal, regulasi, serta kelembagaan.

"Kita perlu terus menggali paradigma baru dalam pendanaan infrastruktur," ujarnya saat memberikan sambutan kunci dalam Indonesia Investment Forum 2018, yang menjadi rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, pekan lalu.

Seperti diketahui, Indonesia Investment Forum 2018 diinisiasi oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kegiatan yang berlangsung di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 tersebut turut menghadirkan berbagai narasumber dalam diskusi panel.

Sejumlah narasumber itu di antaranya World Bank, Moody's, BlackRock, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Badan Pengatur Jalan Tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk., AIA Group, Indonesia Infrastructure Finance, Kementerian ESDM, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Macquarie, Allianz, dan Bank Mandiri.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno mengatakan bahwa penerus pelat merah akan terus memainkan peran aktif terutama dalam proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa proyek yang ditawarkan kepada investor memberikan tingkat pengembalian yang menarik dengan risiko yang dapat dikelola.

Untuk proyek yang penting tetapi belum layak secara komersial, pemerintah terlibat baik dalam bentuk suntikan modal dari anggaran negara maupun jaminan pemerintah. Beberapa proyek yang masuk katagori tersebut misalnya jalan tol di wilayah terluru.

Dalam Indonesia Investment Forum 2018, Rini mengajak para investor untuk mengenal lebih dekat peluang investasi di 80 proyek infrastruktur yang melibatkan penerus pelat merah.

Dia menjelaskan bahwa diperlukan skema pembiayaan yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur. Apalagi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kapasitas terbatas untuk mengambil utang selama masa ekspansi.

Pihaknya menyebut pendanaan melalui penerbitan instrumen surat utang, sindikasi perbankan, dan penawaran umum perdana saham tetap menjadi andalan ke depannya. Akan tetapi, diperlukan skema lain yang lebih inovatif baik instrumen yang bersifat utang maupun ekuitas.

Adapun, Rini mengatakan bahwa terdapat empat lokus area pengembangan proyek infrastruktur yang bakal dilakukan pemerintah. *Pertama*, sektor listrik untuk mencapai rasio elektrifikasi mencapai 99,9% pada akhir 2019 serta mendorong porsi energi terbarukan.

Kedua, konektivitas jalan untuk memperpanjang jalan tol mencapai 1.794 kilometer pada 2019. *Ketiga*, konektivitas laut untuk meningkatkan kapasitas kargo 34,8 juta TEUs pada akhir 2019. *Keempat*, konektivitas bandara untuk mencapai target 235 juta penumpang pada akhir 2019.

INOVASI

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan infrastruktur, Rini mengatakan diperlukan sumber pendanaan yang tepat. Apalagi, BUMN memiliki kapasitas terbatas untuk mengambil utang selama tahap ekspansi.

"Sumber pendanaan konvensional seperti pinjaman bank, penerbitan obligasi rupiah domestik, dan penawaran umum perdana saham [IPO] terpilih akan terus menjadi sumber pembiayaan yang dapat diandalkan. Struktur lain yang lebih inovatif di kelas utang dan ekuitas akan semakin memainkan peran besar," paparnya.

Sebagai puncak Indonesia Investment Forum 2018, dilakukan signing ceremony penandatanganan investasi dan pembiayaan antara 14 BUMN dan investor serta lembaga keuangan untuk 19 transaksi. Adapun, nilai kesepakatan mencapai US$13,5 miliar. Mayoritas dari kesepakatan yang diteken merupakan bentuk strategic partnership.

Salah satu terobosan atau alternatif yang dilaksanakan dari belasan transaksi tersebut yakni instrumen Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur atau KIK-DINFRA.

Skema tersebut merupakan kerasi Bank Mandiri melalui entitas anak PT Mandiri Sekuritas dan PT Mandiri Manajemen Investasi yang bekerja sama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Indonesia Investment Forum 2018 bertujuan memberikan mansia bahwa investasi infrastruktur masih berlanjut dan bertumbuh besar. Artinya, peluang yang ada akan kian menarik bagi para investor.

"Indonesia di tengah berbagai tantangan bisa terus membangun infrastruktur. Untuk itu, kita butuh investasi dan investasinya diharapkan bisa menghasilkan *return*," jelasnya di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, pekan lalu.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa KIK-DINFRA menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal. Instrumen tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan di bidang infrastruktur untuk mendapatkan sumber pendanaan yang efektif dengan biaya yang terukur.

"Inisiatif ini juga akan memperdalam pasar keuangan domestik melalui penambahan produk investasi berbasis proyek infrastruktur," ujarnya.

Dia mengatakan langkah yang ditempuh sebagai upaya mendukung perusahaan di bidang infrastruktur. Dengan demikian, pembangunan dapat dukuselerasi.

Menurutnya, Indonesia perlu menginvestasikan US$1.231 miliar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut harus diwujudkan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian pada kisaran 5,5%.

Dari sisi perbankan, Kartika menganalkan bahwa dukungan terus meningkat tajam dengan kualitas yang terjaga. Total pembiayaan perbankan meningkat rerata 18% per tahun dari Rp121 triliun pada 2010 menjadi Rp378 triliun pada 2017.

Adapun, emiten berkode saham BMRI itu telah menyalurkan pembiayaan langsung ke sektor infrastruktur hingga mencapai lumpir 24% dari total portofolio kredit perseroan. Pada akhir semester I/2018, total penyaluran naik 23% secara tahunan atau mencapai Rp165,8 triliun dari total komitmen Rp255,9 triliun yang sudah diberikan ke proyek-proyek infrastruktur.

Secara detail, subsektor yang memperoleh pembiayaan infrastruktur dari BMRI yakni kelistrikan Rp36,8 triliun, transportasi Rp39,3 triliun, migas dan energi terbarukan Rp24,1 triliun, konstruksi Rp18,3 triliun, dan telekomunikasi Rp17,3 triliun.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas menambahkan Indonesia Investment Forum 2018 menjadi wadah untuk menciptakan sinergi antara investor, pemangku kepentingan, dan berbagai pelaku investasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, ratusan investor akan mengeksplorasi potensi investasi di Indonesia.

Secara terpisah, Chein Tai, Chairman CPC Corporation, yang dalam kesempatan tersebut menekeni *framework agreement* dengan PT Pertamina (Persero), menyambut positif forum Indonesia Investment Forum 2018 serta iklim investasi di Tanah Air.

Menurutnya, penandatanganan yang dilakukan di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 merupakan kesempatan yang baik. "Kami dapat menunjukkan dan berbagi pengalaman yang baik kepada dunia," jelasnya.

Sebagai negara dengan populasi yang besar, Chein melihat potensi ekonomi Indonesia sangat baik. Dari pengalaman beliau sama selama 20 tahun, pihaknya melihat tidak ada masalah yang dihadapi dan terus mencari peluang investasi lainnya.

Inovasi Pembiayaan dalam Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Indonesia Perlu Investasi Sekitar US$1.231 Miliar Hingga 2030 untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Infrastruktur Pemerintah Meningkat Signifikan Sejak 2015

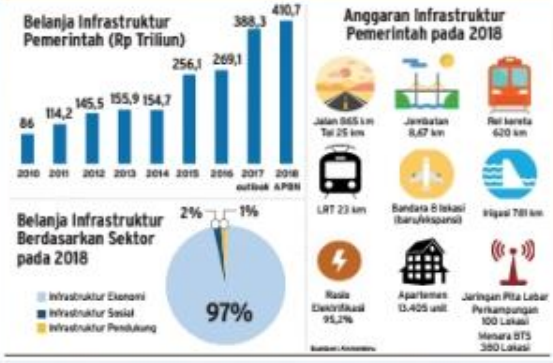

Judul	**Menanti Terbentuknya Badan Pengelola Tapera**	Tanggal	Selasa, 16 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Realisasi program pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera oleh Kementerian PUPR masih menunggu diresmikanya Badan Pengelola Tapera yang hingga kini belum juga menemukan keputusan final.		

Menanti Terbentuknya Badan Pengelola Tapera

JAKARTA — Realisasi program pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih menunggu diresmikannya Badan Pengelola (BP) Tapera yang hingga kini belum juga menemukan keputusan final.

Finna U. Ulfah
redaksi@bisnis.com

Padahal, Kementerian PUPR telah menargetkan Tapera dapat direalisasikan pada awal 2019.

Plt Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan saat ini Kementeriannya telah mengantongi masing-masing 3 nama sebagai kandidat posisi Komisioner, deputi komisioner bidang pengerahan dana tapera, deputi komisioner bidang pemupukan dana tapera, deputi komisioner bidang pemanfaatan dana tapera, deputi komisioner bidang hukum dan administrasi yang diharapkan akan ditetapkan oleh Presiden pada pertengahan Desember 2018.

"[Calon komisioner dan deputi komisioner] sudah disampaikan kepada Bapak Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera dan segera dirapatkan dalam Rapat Komite Tapera akhir bulan ini, Nanti hasilnya segera diusulkan kepada Bapak Presiden," ujar Khalawi, Senin (15/10)

Selain menunggu diresmikannya BP Tapera, Kementerian PUPR juga masih menunggu kepastian paraf Menteri Keuangan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tapera.

▸ Kementerian PUPR juga masih menunggu kepastian paraf Menteri Keuangan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah Tapera.

Menunggu Berlakunya Tapera

DPR telah mensahkan UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada awal 2016 lalu. Namun, UU itu belum juga berjalan karena pemerintah harus menyelesaikan aturan pelaksanaan UU Tapera dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan membentuk Badan Pengelola Tapera serta Komite Tapera. Juga menetapkan bank kustodian, bank pembiayaan, dan manajer investasi.

Ada sejumlah perkembangan penting dalam Tapera, yaitu

- Besaran pungutan simpanan sebesar 3% dari gaji, dengan rincian sebesar 2,5% dari pekerja dan sebesar 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja.
- Pada tahap awal Tapera, Keikutsertaan peserta diperkirakan dapat mencapai 7,1 juta peserta yang berasal dari pekerja publik.
- Keikutsertaan pegawai swasta dalam Tapera berlaku paling lama 7 tahun sejak RPP resmi diberlakukan.
- Pada tahap awal pengoperasian, BP Tapera mengantongi saldo awal peserta sebesar Rp9 triliun yang berasal dari dana Taperum PNS hasil likuidasi Bapertarum-PNS.

Sumber: Kementerian PUPR — Bisnis/Amri Hidayat

Khalawi mengatakan sejauh ini RPP Tapera telah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan dan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setelah draf RPP itu ditandatangani oleh Menteri Keuangan.

"Diharapkan Desember 2018 juga RPP tentang Penyelenggaraan Tapera sudah ditetapkan Presiden dan diundangkan sebagai alat kelengkapan beroperasinya BP Tapera," ujar Khalawi.

Dalam RPP tersebut telah disepakati bahwa besaran pungutan simpanan menjadi sebesar 3% dari gaji dengan rincian sebesar 2,5% dari pekerja dan sebesar 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja yang nantinya dapat dievaluasi dan ditetapkan kembali apabila terdapat perubahan besaran simpanan.

Pada tahap awal Tapera, Kementerian PUPR memperkirakan keikutsertaan peserta dapat mencapai 7,1 juta peserta yang berasal dari Pekerja Publik, yaitu peserta pegawai negeri sipil sebanyak 4,5 juta, dan sisanya berasal dari BUMN, BUMD, BUMDes, TNI dan POLRI sebanyak 2,6 juta peserta.

MODAL AWAL

Sementara itu, keikutsertaan pegawai swasta dalam Tapera disepakati akan berlaku paling lama 7 tahun sejak RPP resmi diberlakukan.

Terkait modal awal yang akan digunakan oleh BP Tapera, katanya, juga telah selesai dibahas pada tingkat harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan segera dilakukan proses penetapan oleh Presiden. "Diharapkan akan ditetapkan pada awal Desember 2018."

Pada tahap awal pengoperasian, BP Tapera telah mengantongi saldo awal peserta sebesar Rp9 triliun yang berasal dari dana Taperum PNS hasil likuidasi Bapertarum-PNS yang telah resmi dibubarkan pada 25 Maret 2018.

"Sedang dalam proses dimasukkan ke DIPA [Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran] yang diharapkan pencairan modal awal dari KPPN [kantor pelayanan perbendaharaan negara] terealisasi paling lambat awal bulan Desember 2018," papar Khalawi.

Khalawi berharap pada awal tahun 2019 BP Tapera akan mulai beroperasi dengan menunjuk Bank Kustodian, Manajer Investasi, dan Bank/Perusahaan Pembiayaan dan melakukan penataan organisasi BP Tapera.

BP Tapera ditargetkan akan beroperasi penuh, seperti sudah melakukan aktivitas pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan Dana Tapera paling lambat 1 tahun setelah BP Tapera resmi ditetapkan beroperasi.

Kementerian PUPR juga tengah melakukan penjajakan atas gedung kantor yang akan digunakan BP Tapera yang direncanakan akan berlokasi di Jalan Penjernihan nomor 1 Pejompongan Jakarta Pusat. ■

Judul	**Berita Foto**	Tanggal	Selasa, 16 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Pengendara melintas di Jalan Tol Bogor-Ciawi- Sukabumi seksi I yang belum beroperasi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat.		

▶ TARGETKAN 13 RUAS TOL BARU

Antara/Yulius Satria Wijaya

Pengendara melintas di Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi I yang belum beroperasi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Senin (15/10). Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 13 ruas tol baru dengan total panjang 473,9 km siap dioperasikan hingga akhir 2018.

Judul	**REI DKI Tunggu Lokasi Lahan dari Pemprov**	Tanggal	Selasa, 16 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	REI DKI menyatakan siap mendukung program DP 0 tetapi masih menunggu kepastian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk penentuan lahan.		

REI DKI Tunggu Lokasi Lahan dari Pemprov

JAKARTA — REI DKI menyatakan siap mendukung program DP Rp0 tetapi masih menunggu kepastian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk penentuan lahan.

Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman HD mengatakan REI DKI siap maju menggarap proyek DP Rp0 dan telah menghimpun 21 pengembang membuat surat pernyataan mendukung program gubernur tersebut.

"Anggota REI seperti Agung Podomoro Land, Alam Sutera, Ciputra, Metropolitan Land, ada yang bersedia. Ini kan hajatan pemerintah jadi tergantung pemerintah yang punya hajat," katanya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Dia mengatakan secara organisasi REI siap mendukung, tetapi wewenang pemprov DKI untuk menentukan kapan dan lokasi mana yang diizinkan. Sepanjang didukung banyak pihak, yaitu dari penyediaan lahan, perizinan, pembangunan sampai penjualan, dan bila dikelola dengan baik, dia optimistis program itu dapat berlanjut.

Pekan lalu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan resmi meluncurkan Apartemen Klapa Village, yang dikenal dengan pengembangan proyek apartemen DP Nol Rupiah. Proyek dengan rencana empat menara itu dikembangkan oleh BUMD PD Pembangunan Sarana Jaya.

DIPESAN NOVEMBER

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan penjualan secara resmi dibuka pada 1 November 2018 yang bisa dilakukan secara *online* melalui *dp0rupiah.jakarta.go.id* atau mendatangi kantor dinas perumahan secara langsung.

Pembangunan tahap pertama, katanya, akan dibangun sebanyak 780 unit dengan rincian tipe 21 sebanyak 420 unit yang dibanderol harga mulai dari Rp184 juta hingga Rp213,4 juta, dan tipe 36 sebanyak 360 unit yang dibanderol harga mulai dari Rp304,9 juta hingga Rp310 juta. Apartemen tersebut ditargetkan tutup atap pada Januari 2019 dan serah terima unit pada Juli 2019.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan pihaknya telah menyiapkan proyek pengembangan apartemen DP Rp0 kedua di Cilangkap, Jakarta Timur yang akan dilakukan prosesi peletakan batu pertama pada awal 2019.

"Kurang lebih 900 unit, dan ada pembangunan banyak lagi tinggal tunggu tanggal mainnya," ujar Yoory kepada *Bisnis*, belum lama ini.

Apartemen tersebut tidak akan berbeda jauh dengan pengembangan apartemen Klapa Village, yaitu dibangun di lahan seluas 3 hektare dengan total investasi sekitar Rp180 miliar.

Yoory mengatakan pengembangan apartemen di Cilangkap yang belum diberi nama tersebut akan terdiri atas apartemen komersial nonsubsidi dan apartemen bersubsidi atau rusunami, yang keduanya tetap bisa menggunakan skema pembiayaan DP Rp0.

Selain itu, Yoory mengaku tengah mempersiapkan proyek dengan skema yang sama di Jakarta Selatan yang masih dalam tahap pembicaraan dengan target akan diluncurkan pada 2019. ***(Finna U. Ulfa/Maria Elena)***

Judul	**Waskita Targetkan Kontrak Diteken Januari 2019**	Tanggal	Selasa, 16 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	PT Waskita Toll Road menargetkan bisa menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol atau kontrak jembatan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara pada Januari 2019.		

Waskita Targetkan Kontrak Diteken Januari 2019

JAKARTA — PT Waskita Toll Road menargetkan bisa menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol atau kontrak jembatan tol Balikpapan—Penajam Paser Utara pada Januari 2019.

Sebagai pemrakarsa, perseroan optimistis bisa memenangi lelang jembatan tol di Kalimantan Timur tersebut.

Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto mengatakan bahwa tahap prakualifikasi diharapkan bisa berlangsung pada Oktober 2018.

Dia mengakui bahwa proses lelang sedikit meleset dari proyeksi awal karena ada beberapa persyaratan yang harus direvisi.

"Prosesnya tidak secepat yang kami bayangkan, tetapi kami targetkan PQ [*pre-qualification*] bulan ini [Oktober 2018] sehingga PPJT [perjanjian pengusahaan jalan tol]-nya kami targetkan Januari [2019]," kata Herwidiakto kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Perusahaan semula berharap supaya bisa memulai konstruksi jembatan tol tersebut pada tahun ini. Namun, saat ini tahap konstruksi dijadwalkan berlangsung pada Februari 2019. Jembatan tol tersebut akan membentang sepanjang 7,60 kilometer melintasi Teluk Balikpapan.

Herwidiakto mengemukakan bahwa saat ini penetapan lokasi atau penlok sudah berlangsung.

Tahap ini berlangsung cepat karena proyek jembatan tol tidak membutuhkan lahan yang luas. Secara keseluruhan, kebutuhan lahan hanya mencapai 24 hektare.

Dalam menggarap proyek itu, Waskita Toll Road berkongsi dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Anak perusahaan PT Waskita Karya Tbk. (WSKT) itu menggenggam 60% saham di badan usaha jalan tol PT Tol Teluk Balikpapan, sisanya dimiliki oleh pemda.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), jembatan tol Balikpapan—Penajam membutuhkan investasi sebanyak Rp16,50 triliun. Jembatan tol akan menjadi alternatif bagi konektivitas Balikpapan dan Penajam Paser Utara.

Keberadaan jembatan tol akan memangkas waktu perjalanan menjadi tinggal 10 menit. Saat ini, masyarakat Balikpapan dan Penajam Paser Utara mengandalkan angkutan laut tradisional kelotok dan feri untuk menyeberang dengan durasi waktu 30 menit hingga 2 jam.

Saat ini Waskita Toll Road juga sudah berhitung mengenai tarif yang akan dipatok kepada pengguna jembatan. Tarif itu bakal dibanderol lebih murah dibandingkan dengan moda angkutan lain.

Herwidiakto memberi gambaran bahwa tarif jembatan tol untuk sepeda motor diperkirakan dipatok Rp25.000 karena tarif menyeberang dengan kelotok mencapai Rp35.000.

"*Willingness to pay* jembatan itu hampir 100% dan keuntungannya bisa bekali-kali karena lebih cepat, lebih murah, dan selamat [sampai tujuan]," tuturnya. **(Rivki Maulana)**